



Imam-Fadli Resmi Gugat ke MK

JOGJA-Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja, Imam Priyono-Achmad Fadli mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja.

Ujang Hasanudin
ujang@harianjogja.com

- ▶ Tim Imam-Fadli memastikan mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Kota Jogja pada Senin (27/2).
- ▶ Jadwal penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja terpilih akan ditunda jika ada gugatan sengketa Pilkada ke MK.

"Sekarang saya sedang di Jakarta menyiapkan materi gugatan," kata Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiarmoko, saat dihubungi *Harian Jogja*, Sabtu (25/2).

Danang menyatakan alasannya menggugat karena selisih suara sangat tipis sehingga ada hak untuk membawa ke jalur hukum. Hasil perolehan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilkawot) Jogja 2017 yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Jogja, Jumat (24/2) lalu untuk paslon Imam Priyono-Achmad Fadli sebanyak 99.146 atau 49,70%.

Sementara pasangan calon Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi memperoleh suara sebanyak 100.333 suara atau 50,29%. Selisih suara kedua paslon hanya 1.187 suara atau 0,6% unggul Haryadi-Heroe. KPU Kota Jogja juga menetapkan total suara sah sebanyak 199.479 suara dan suara tidak sah 14.355 suara.

Danang mengatakan alasan menggugat bukan soal menang kalah, melainkan menegakkan aturan dan memastikan hak konstitusional warga Kota Jogja terjamin.

La melihat ada indikasi kecurangan dalam proses rekapitulasi suara dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sampai tingkat KPU.

• Lebih Lengkap Halaman 9

| | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Amat Segera | <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |
| | <input type="checkbox"/> Segera | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Biasa | <input type="checkbox"/> Jumpa Pers |

Yogyakarta,

Imam-Fadli Resmi...

Pihaknya menilai penyelenggaraan Pilwalkot Jogja tidak konsisten. Saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan, kata dia, panitia pengawas kecamatan (Panasas) sempat merekomendasikan pembukaan kotak suara di Kotagede dan Umbulharjo. "Tapi itu tidak diindahkan oleh KPU," kata dia.

Selain itu, Danang menurukan, pembukaan kotak suara tidak sah di Umbulharjo yang hanya dilakukan dengan sampling dinilai tidak ada yang ikut. Dalam rekapitulasi di KPU sempat ada pembukaan 11 kotak suara, namun KPU hanya mengambil dua sampel surat suara dari tiap kotak suara tidak sah. Gugatan akan didaftarkan ke MK pada Senin (27/2).

Ketua Badan Pemantauan Pemilu (Bapil) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Antonius Fokki Ardianto saat menjadi saksi dalam proses rekapitulasi di KPU kecewa pembukaan kotak suara tidak sah hanya mengambil sampel. Menurutnya, semestinya surat suara tidak sah lainnya juga dibuka.

Karena keberatannya tak dipenuhi, Fokki pun *walk out* dari ruang sidang pleno. Ia menuding ada indikasi kecurangan yang sistemik, dan masif dalam proses rekapitulasi suara.

Anggota Tim Pemantauan Hariyadi Suyu-Herwe Perwadi, Riki Lestanto menghormati rivalnya mengajukan gugatan sengketa hasil Pilwalkot ke MK. Namun demikian, pihaknya mengadukan bahwa proses gugatan perlu disertai bukti-bukti yang kuat.

Menurut dia, putusan KPU sudah final. Namun pihaknya juga sudah menyiapkan tim advokasi untuk mengawal gugatan tersebut. Sejauh ini, kata dia, dalam catatan timnya selama proses penyelenggaraan pilwalkot tidak menemukan adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran.

Ia juga tidak menemukan adanya keberatan saat proses penghitungan suara di TPS dari saksi kedua paslon. "Artinya di tingkat paling dasar (TPS) pun tidak ada perselisihan dan keberatan," kata Riki.

Penetapan Ditunda

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budiarto mengatakan penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Jogja terpilih bisa dilakukan pada 6-10 Maret mendatang. Namun, kata dia, jika ada gugatan sengketa hasil Pilwalkot, waktu penetapan akan ditunda.

"Penetapan itu opsional, kalau ada gugatan otomatis kami menunggu putusan MK nanti seperti apa isi putusannya," kata Wawan.

Menurut Wawan, gugatan ke MK diberi waktu 3x24 jam. Sejak pleno rekapitulasi suara di KPU, Jumat malam lalu sampai kemarin, Wawan mengaku belum mendapat pemberitahuan adanya gugatan. Ia juga mengecek website Mahkamah Konstitusi baru ada 11 daerah yang mengajukan gugatan, belum ada gugatan dari Jogja.

Hingga Jumat tengah malam baru ada 11 permohonan pendaftaran pengajuan sengketa Pilkada di MK sejak dibuka Rabu (22/2). Jumat (24/2) di gedung MK, sepuluh pasangan calon kepala daerah

Rincian Jadwal Sengketa Pilkada 2017 Di Mahkamah Konstitusi

Sengketa Pemilihan Wali Kota/Bupati

22-24 Februari

Pengumuman keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan oleh KPU.

22-28 Februari

Pengajuan permohonan pemohon, pencatatan permohonan dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BPKK), dan penyampaian Akta Penjualan Permohonan (APK).

2 Maret

Pemeriksaan kelengkapan permohonan.

6-7 Maret

Penyusunan Akta Permohonan Lengkap (APL) kepada pemohon.

13 Maret

Penyerahan Buku registrasi perkara Konstitusi (BRPK) & Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon.

Tahapan Persidangan Perselisihan Hasil Pilkada Serentak

16-22 Maret

Tahapan sidang panel/pleno pemeriksaan persidangan. Agendanya, penjelasan permohonan pemohon dan perbaikan permohonan pemohon apabila dipandang perlu pengesahan alat bukti.

20-24 Maret

Sidang panel/pleno pemeriksaan persidangan. Agendanya, jawaban termohon dan mendengarkan keterangan pihak terkait.

27 - 29 Maret

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Agendanya, pembahasan perkara dan pengambilan keputusan (formal).

30 Maret-5 April

Sidang pleno. Agendanya, pengucapan putusan disisi.

6 April-2 Mei

Sidang panel/pleno pemeriksaan persidangan. Agendanya, pembuatan permohonan, permohonan dan pihak terkait.

3-9 Mei

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Agendanya, pembahasan perkara dan pengambilan keputusan.

10-19 Mei

Sidang pleno pengucapan putusan. Agendanya, pengambilan keputusan sela atau keputusan akhir.

menyerahkan berkas permohonan.

Mereka yang mendaftarkan gugatan adalah pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Tengah M Sabri dan Nasipin serta Abdurrahman Rasad dan Rajab Marwan untuk Kabupaten Gayo Lues.

"Markus Waine dan Angkian Goo

dari Kabupaten Dogiyai. Pemohon perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Kendari Abdul Rasik dan Haris Andi Sulhan. Sedangkan untuk pemilihan wali kota di Salatiga diajukan Agus Rulfianto dan Dance Isbak Palli," ujar salah satu petugas pendaftaran.

Mendekati tengah malam atau menjelang penutupan permohonan sengketa, sebanyak lima pasangan calon menyerahkan berkas. Mereka adalah pasangan cabup-cawabup Kasra Iru Munara dan Man Arafah (Bembina, Subel), pasangan cabup-cawabup M Ali Sangaji dan Yulce Makasarat (Morotai), pasangan cabup-cawabup Subroto dan Nur Yulhaman (Jayora), pasangan cabup-cawabup TR Keumang dan Said Junaidi (Nagan Raya, Aceh), dan pasangan cabup-cawabup Hamdi dan Harmin (Tobo, Jember).

Satu permohonan lainnya diterima MK pada Kamis (23/2) kemarin dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim. Untuk tingkat kabupaten kota, pengajuan pendaftaran sengketa Pilkada di MK akan ditutup pada Selasa (28/2).

Kasus Penganiayaan

Sementara itu Kepolisian Resort Kota Jogja telah memeriksa lima orang saksi dalam kasus dugaan penganiayaan simpatisan sekaligus relawan salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jogja. Namun, dari lima saksi belum ada yang ditetapkan menjadi terduga.

"Masih kami periksa intensi, kami gali keterangannya," kata Kepala Polresta Jogja, Komisaris Besar Polisi, Tommy Wilisano, Sabtu (25/2).

Sampai kemarin, penyidik Polresta Jogja masih terus mendalami kasus tersebut. Menurut Tommy, dugaan penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan wa kota dan wakil wali kota (Pilwalkot) Jogja. Antara korban dan pelaku, kata dia, memiliki persoalan pribadi. "Ini persoalan antarkawan. Mereka punya persoalan hilir kebetulan kelemuranya depan KPU Kota," ujar Tommy.

Korban dugaan penganiayaan tersebut adalah Daniel Sepnas, 30, Danurejan. Ia merupakan relawan pasangan calon Hariyadi Suyu dan Herwe Perwadi. Penganiayaan terjadi Rabu (22/2) siang, saat terjadi aksi unjuk rasa para pendukung pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Jalan Magelang KM 4, Tegayutro.

Saat itu Daniel sedang duduk-duduk bersama tiga temannya di utara peserta aksi. Kemudian didatangi salah satu peserta aksi. Setelah itu ia didatangi sekitar 10 orang peserta aksi, lalu memukul korban. Akibatnya ia mengalami luka dibagian pelipis dan tangan.

Daniel dituntut provokator. Namun ia membantahnya. "Kalau saya memprovokasi namanya saya cari mati, wong saya cuma senendi sementara massanya ramai begitu," kata Daniel. Dia mengaku kenal dengan salah satu peserta aksi yang mengancaminya karena tetangga satu kecamatan, bahkan pernah bertemu saat menjadi saksi di Kecamatan Danurejan, saat rekapitulasi suara. *lanu/pesa*

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) | | | |

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005